

Implementasi ABCD Pada Bimbel Sebagai Upaya Menjaga Kontinuitas Sumber Belajar di Dukuh Temon

Muhammad Asrori¹, Hazim Ahrori², Konik Naimah³

IAI Sunan Giri Ponorogo, Indonesia

* Correspondence e-mail; asrorimuhammad313@gmail.com

Article history

Submitted: 2026/06/01; Revised: 2026/08/05; Accepted: 2026/09/17

Abstract

Education in rural areas cannot be placed entirely on schools, as limited parental time among farming families and diverse educational backgrounds within households often leave gaps in children's learning support at home. This situation motivated the implementation of a tutoring program for kindergarten and elementary school students in Temon Hamlet, Pagerukir Village, Ponorogo Regency, using the Asset-Based Community Development (ABCD) approach, which emphasizes community assets rather than deficiencies as the basis for empowerment. This community service study employed a descriptive qualitative method, with data collected through observation, interviews with five key informants, and documentation. The program involved 10 students from the Community Service Program (KPM) and 29 children from two educational levels, with learning materials flexibly adapted to their daily educational needs. The results indicate that the program successfully connected human, social, institutional, and physical assets that had previously functioned separately, while generating multiple benefits for children, parents, teachers, and the village government. The main challenge identified was program sustainability after the completion of the KPM period. Therefore, strengthening the roles of youth, parents, teachers, and village government is essential to ensure that the tutoring program continues beyond the students' return to campus.

Keywords

Community Assets; Community Empowerment; Program Sustainability; Rural Education; Tutoring



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki posisi penting dalam kehidupan anak karena melalui proses pendidikan berkembang berbagai aspek yang menjadi dasar kehidupannya, seperti akhlak, kreativitas, pengetahuan, dan kemampuan berinteraksi dengan lingkungan. Proses tersebut tidak berlangsung hanya di dalam ruang kelas, tetapi juga membutuhkan dukungan yang berkesinambungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Anak memerlukan suasana belajar yang memungkinkan mereka

memperoleh pendampingan, pengalaman, dan kesempatan untuk mengembangkan potensi secara optimal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan konsep tripusat pendidikan Ki Hadjar Dewantara yang menempatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai tiga lingkungan utama yang saling berkaitan dalam proses pendidikan anak (dalam Muslich, 2014). Dengan demikian, keberhasilan pendidikan di sekolah akan lebih optimal apabila memperoleh dukungan yang selaras dari keluarga dan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang lain.

Kondisi ideal tersebut tidak selalu mudah diwujudkan, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi tertentu. Keterbatasan pendampingan belajar anak di rumah tidak selalu menunjukkan rendahnya kepedulian orang tua terhadap pendidikan, tetapi dapat berkaitan dengan keterbatasan waktu, pekerjaan, dan kapasitas keluarga dalam mendampingi proses belajar. Kondisi tersebut terlihat di Desa Pagerukir. Berdasarkan data yang dihimpun selama kegiatan pengabdian, sebanyak 888 penduduk bekerja sebagai petani, sedangkan penduduk yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara hanya berjumlah 10 orang. Desa ini memiliki sekitar 2.138 jiwa dengan latar belakang pendidikan masyarakat yang sebagian besar berada pada jenjang sekolah dasar. Dari sisi kehidupan sosial-keagamaan, sekitar 99 persen penduduk beragama Islam sehingga terbentuk ikatan sosial yang relatif erat di antara masyarakat. Dominasi pekerjaan sebagai petani menyebabkan aktivitas masyarakat sangat dipengaruhi oleh musim, kondisi lahan, serta waktu kerja yang mengikuti ritme matahari. Dalam situasi demikian, waktu orang tua untuk memberikan pendampingan belajar kepada anak menjadi terbatas. Persoalan tersebut lebih tepat dipahami sebagai keterbatasan sumber daya waktu dan kapasitas pendampingan daripada semata-mata persoalan rendahnya perhatian terhadap pendidikan anak. Slameto (2015) menjelaskan bahwa keberhasilan belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, termasuk lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, keterbatasan salah satu lingkungan tersebut perlu direspons melalui penguatan lingkungan pendidikan lainnya secara terpadu.

Cara pandang terhadap persoalan masyarakat selanjutnya menentukan bentuk intervensi yang dilakukan. Pendekatan pembangunan yang berangkat dari daftar permasalahan sering kali menempatkan masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan bantuan, sementara solusi lebih banyak dirancang dan diberikan oleh pihak eksternal. Pola demikian berpotensi melahirkan program yang bergantung pada keberadaan pelaksana dari luar dan berhenti ketika pendampingan berakhir. Perspektif yang berbeda ditawarkan melalui Asset Based Community Development (ABCD), yaitu pendekatan pemberdayaan yang menjadikan aset dan kekuatan yang telah dimiliki masyarakat sebagai titik awal pengembangan. Kretzmann dan McKnight (1993) menjelaskan bahwa masyarakat memiliki beragam aset yang dapat dikembangkan, baik berupa kapasitas individu, hubungan sosial, organisasi dan kelembagaan, fasilitas fisik, maupun pengalaman kolektif. Dengan perspektif tersebut, masyarakat tidak ditempatkan sebagai objek penerima program, tetapi sebagai pihak yang memiliki sumber daya untuk membangun dan mengembangkan solusi bagi persoalannya sendiri. Sejalan dengan pandangan tersebut, Mardikanto dan Soebiato (2017) menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mengenali, mengembangkan, dan mengelola potensi yang dimilikinya secara mandiri. Dalam konteks pendidikan, pendekatan ini membuka peluang untuk menjadikan sumber daya lokal sebagai bagian dari sistem pendukung belajar anak, sehingga program pengabdian tidak berhenti pada aktivitas mengajar, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat untuk melanjutkannya.

Sejumlah penelitian terdahulu memperlihatkan relevansi pendekatan berbasis aset sekaligus menunjukkan persoalan keberlanjutan dalam program pendampingan pendidikan masyarakat. Suharto (2014) menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan kemampuan program dalam menggerakkan sumber daya lokal, bukan hanya memberikan bantuan dari pihak luar. Wulandari dan Prasetyo (2020), melalui kajian mengenai pendampingan belajar berbasis komunitas di pedesaan Jawa Tengah, menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa KKN/KPM dapat mendorong minat belajar anak, tetapi dampak tersebut cenderung bersifat jangka pendek ketika tidak terdapat pihak lokal yang dipersiapkan untuk melanjutkan program setelah mahasiswa menyelesaikan tugasnya. Temuan Handayani (2019) mengenai bimbingan belajar berbasis masyarakat di Boyolali juga menunjukkan pola yang serupa. Antusiasme masyarakat dan anak pada tahap awal relatif tinggi, tetapi keberlanjutan program menghadapi kendala karena kegiatan masih bertumpu pada pengajar dari luar dan belum

mengoptimalkan aset masyarakat setempat. Sementara itu, Nugroho (2021) menunjukkan bahwa pemetaan aset komunitas dapat memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap program pendidikan, meskipun kajiannya lebih menekankan aset kelembagaan dan belum secara khusus membahas bagaimana berbagai aset tersebut dapat dihubungkan untuk mendukung bimbingan belajar anak lintas jenjang dalam satu program.

Telaah terhadap penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata terletak pada ketersediaan aset, tetapi pada bagaimana berbagai aset yang ada dapat dihubungkan dan diorganisasikan menjadi sebuah sistem pendukung pendidikan yang berkelanjutan. Pendekatan ABCD telah digunakan dalam berbagai konteks pemberdayaan, termasuk ekonomi, kesehatan, literasi, dan pendidikan. Namun, dalam praktik bimbingan belajar melalui program KPM atau KKN, kegiatan masih sering berlangsung secara konvensional: mahasiswa hadir sebagai pengajar, melaksanakan kegiatan selama periode pengabdian, kemudian meninggalkan lokasi ketika masa tugas berakhir. Pola tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi anak, tetapi belum tentu menghasilkan mekanisme yang dapat diteruskan oleh masyarakat. Belum banyak kajian pengabdian yang secara eksplisit menggunakan kerangka ABCD untuk mengidentifikasi sekaligus menghubungkan aset manusia, sosial, kelembagaan, dan fisik dalam pelaksanaan bimbingan belajar lintas jenjang di tingkat dukuh, terutama dengan memberikan perhatian khusus pada strategi keberlanjutan program setelah mahasiswa menyelesaikan masa KPM.

Artikel ini menawarkan kebaruan pada dua aspek utama. Pertama, bimbingan belajar ditempatkan bukan sekadar sebagai aktivitas tambahan untuk membantu anak memahami materi pelajaran, tetapi sebagai ruang untuk menghubungkan berbagai aset lokal yang sebelumnya berjalan secara terpisah. Anak, mahasiswa, guru, orang tua, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta fasilitas yang tersedia di lingkungan setempat dipandang sebagai bagian dari ekosistem pendidikan yang dapat saling mendukung. Kedua, artikel ini memberikan perhatian khusus pada keberlanjutan program dengan menempatkan mahasiswa KPM sebagai pemantik perubahan, bukan sebagai pusat kegiatan. Posisi tersebut penting agar keberadaan mahasiswa tidak menjadi satu-satunya sumber daya program. Sebaliknya, proses pengabdian diarahkan untuk meninggalkan pengetahuan, pengalaman, jejaring, dan mekanisme kegiatan yang memungkinkan masyarakat melanjutkan pendampingan belajar setelah mahasiswa kembali ke perguruan tinggi.

Berdasarkan konteks tersebut, artikel ini membahas tiga persoalan utama, yaitu: (1) bagaimana aset masyarakat di Dukuh Temon dapat diidentifikasi dan dioptimalkan untuk mendukung kegiatan bimbingan belajar; (2) bagaimana pelaksanaan bimbingan belajar bagi siswa TK dan SD dilakukan melalui pendekatan Asset Based Community Development (ABCD); dan (3) bagaimana manfaat program dirasakan oleh berbagai pihak serta bagaimana peluang keberlanjutannya setelah masa KPM berakhir. Sejalan dengan rumusan tersebut, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan aset masyarakat yang dapat dioptimalkan dalam mendukung pendidikan anak, menjelaskan pelaksanaan program bimbingan belajar berbasis ABCD, serta menganalisis manfaat dan peluang keberlanjutan program sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode Asset Based Community Development (ABCD) sebagai kerangka pemberdayaan. Pendekatan kualitatif digunakan karena kegiatan tidak diarahkan untuk mengukur perubahan dalam bentuk angka, tetapi untuk memahami proses pelaksanaan program, pengalaman peserta, bentuk keterlibatan masyarakat, serta pemanfaatan aset lokal dalam mendukung kegiatan pendidikan anak. Moleong (2017) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek secara menyeluruh melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks alamiah. Dalam kegiatan ini, pendekatan tersebut memungkinkan proses bimbingan belajar dipahami bukan hanya dari aktivitas pembelajaran yang berlangsung, tetapi juga dari hubungan antara mahasiswa, peserta didik, keluarga, sekolah, pemerintah desa, dan masyarakat sebagai bagian dari lingkungan pendidikan anak.

Metode ABCD digunakan sebagai kerangka dalam mengidentifikasi, menghubungkan, dan mengoptimalkan aset yang tersedia di masyarakat. Pendekatan ini mengacu pada gagasan Kretzmann dan McKnight (1993) yang menempatkan aset masyarakat sebagai titik awal pemberdayaan. Pelaksanaannya dilakukan melalui proses pengenalan kondisi dan potensi masyarakat, komunikasi dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan pendidikan anak, identifikasi kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, perancangan kegiatan berdasarkan aset yang ditemukan, serta pemanfaatan aset tersebut dalam pelaksanaan program. Dengan kerangka ini, mahasiswa tidak ditempatkan sebagai satu-satunya sumber daya pendidikan, tetapi sebagai fasilitator yang membantu menghubungkan

berbagai potensi yang telah tersedia di lingkungan masyarakat dengan kebutuhan belajar anak.

Kegiatan dilaksanakan di Dukuh Temon, Desa Pagerukir, Kabupaten Ponorogo. Peserta utama kegiatan adalah anak-anak yang berdomisili di Dukuh Temon dan mengikuti jenjang pendidikan TK, SD, dan SMP. Pelaksanaan program didampingi oleh 10 mahasiswa KPM yang bertugas di posko setempat. Penentuan lokasi dan peserta didasarkan pada kondisi masyarakat serta kebutuhan pendampingan belajar anak yang ditemukan selama proses awal pengabdian. Bimbingan belajar dilaksanakan sebagai ruang pendampingan akademik sekaligus sebagai media untuk membangun interaksi antara mahasiswa dan masyarakat dalam mengoptimalkan sumber daya lokal yang dapat mendukung proses belajar anak.

Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara. Observasi dilakukan selama proses pelaksanaan bimbingan belajar dengan memperhatikan jumlah dan karakteristik peserta yang hadir, aktivitas belajar anak, materi yang diberikan, pola interaksi antara mahasiswa dan peserta didik, tingkat keterlibatan anak, serta respons peserta terhadap kegiatan pendampingan. Wawancara dilakukan secara langsung kepada lima informan yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan posisi mereka dalam lingkungan pendidikan anak. Informan tersebut meliputi Pak Sinto sebagai warga masyarakat pada 13 Agustus 2026, Bapak Sarnun sebagai orang tua peserta didik pada 13 Agustus 2026, Pak Suminto sebagai Kepala Desa Pagerukir pada 13 Agustus 2026, Pak Suyoko sebagai guru SDN 3 Pagerukir pada 19 Agustus 2026, dan Wasis sebagai siswa kelas VI SD pada 19 Agustus 2026. Kelima informan dipilih untuk menghadirkan perspektif yang berbeda, yaitu perspektif masyarakat, keluarga, pemerintah desa, sekolah, dan peserta didik. Keragaman informan tersebut memungkinkan informasi mengenai program tidak hanya diperoleh dari pihak pelaksana, tetapi juga dari pihak yang secara langsung merasakan, mendukung, maupun berinteraksi dengan kegiatan.

Data sekunder diperoleh dari data kependudukan dan kondisi sosial wilayah Desa Pagerukir serta dokumentasi selama kegiatan pengabdian. Dokumentasi meliputi berbagai bukti pelaksanaan bimbingan belajar dan aktivitas peserta selama program berlangsung. Data tersebut digunakan untuk melengkapi informasi hasil observasi dan wawancara serta memberikan gambaran mengenai konteks sosial tempat program dilaksanakan.

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui proses pengumpulan data, pemilahan dan pengelompokan informasi, penyajian data, serta penarikan

kesimpulan. Hasil wawancara ditelaah dan dikelompokkan berdasarkan tema yang berkaitan dengan fokus kegiatan, yaitu aset masyarakat, pelaksanaan bimbingan belajar, manfaat program, serta peluang dan tantangan keberlanjutan. Data hasil observasi digunakan untuk memperkuat informasi wawancara, terutama dalam melihat kesesuaian antara pernyataan informan dengan kondisi yang ditemukan selama kegiatan berlangsung. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperjelas proses dan aktivitas program.

Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari warga, orang tua, pemerintah desa, guru, dan peserta didik mengenai peristiwa atau aspek program yang sama. Proses ini dilakukan untuk melihat konsistensi informasi sekaligus mengidentifikasi perbedaan pengalaman dan pandangan antaraktor yang terlibat. Dengan demikian, kesimpulan tidak dibangun berdasarkan satu sumber informasi atau perspektif mahasiswa sebagai pelaksana semata. Sejalan dengan Mardikanto dan Soebiato (2017), pemberdayaan masyarakat perlu memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengenali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, analisis dalam kegiatan ini tidak hanya diarahkan pada apa yang dilakukan mahasiswa, tetapi juga pada bagaimana masyarakat mengenali asetnya, bagaimana aset tersebut dimanfaatkan dalam mendukung bimbingan belajar, serta sejauh mana hubungan antarpihak dapat menjadi dasar bagi keberlanjutan program setelah masa KPM berakhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aset Masyarakat yang Mendukung Program Bimbingan Belajar

Pelaksanaan bimbingan belajar di Dukuh Temon menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya telah memiliki berbagai modal yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan anak sebelum program KPM dilaksanakan. Modal tersebut tidak terutama berupa fasilitas pendidikan formal atau dukungan finansial, tetapi lebih banyak berbentuk sumber daya manusia, hubungan sosial, dan dukungan kelembagaan yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa program bimbingan belajar tidak harus selalu diawali dengan pembentukan lembaga baru atau penyediaan sumber daya dari luar. Melalui perspektif Asset Based Community Development (ABCD), aset yang telah tersedia dapat dikenali, dihubungkan, dan diarahkan untuk menjawab kebutuhan pendidikan anak secara lebih kontekstual. Temuan lapangan menunjukkan sedikitnya empat kelompok aset yang berperan dalam pelaksanaan program, yaitu aset manusia, aset sosial, aset kelembagaan, dan aset fisik.

Aset manusia menjadi salah satu kekuatan utama yang memungkinkan program bimbingan belajar terlaksana. Sepuluh mahasiswa KPM yang ditempatkan di Dukuh Temon memiliki latar belakang pengetahuan, keterampilan akademik, serta waktu yang dapat digunakan untuk mendampingi anak di luar jam sekolah. Keberadaan mahasiswa memberikan tambahan sumber daya pendampingan yang sebelumnya belum tersedia secara terorganisasi di lingkungan dukuh. Pendampingan tersebut terutama berlangsung pada waktu sore hingga malam hari, ketika anak telah menyelesaikan kegiatan sekolah dan memiliki kesempatan untuk belajar kembali. Kehadiran mahasiswa dengan demikian tidak hanya menyediakan tenaga pengajar tambahan, tetapi juga memperluas ruang belajar anak di luar sekolah.

Meskipun demikian, dalam perspektif ABCD, keberadaan mahasiswa tidak semestinya dipahami sebagai pusat utama program. Mahasiswa merupakan aset yang bersifat sementara karena masa keberadaannya di masyarakat dibatasi oleh periode KPM. Posisi yang lebih strategis adalah menjadikan mahasiswa sebagai fasilitator yang membantu masyarakat mengenali, menghubungkan, dan mengoptimalkan aset yang telah mereka miliki. Soetomo (2012) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan proses penguatan kemampuan masyarakat agar mampu menentukan dan mengembangkan kehidupannya berdasarkan potensi yang dimiliki. Berdasarkan pandangan tersebut, kontribusi mahasiswa dalam program ini tidak hanya terletak pada aktivitas mengajar, tetapi juga pada proses membangun hubungan antara kebutuhan belajar anak dengan sumber daya yang tersedia di lingkungan masyarakat. Cara pandang ini penting karena keberhasilan program tidak cukup diukur dari terlaksananya kegiatan selama mahasiswa berada di lokasi, tetapi juga dari kemungkinan munculnya kapasitas lokal yang dapat mempertahankan kegiatan setelah KPM berakhir.

Anak-anak peserta bimbingan belajar juga merupakan bagian penting dari aset manusia dalam komunitas. Sebanyak 29 anak mengikuti kegiatan, yang terdiri atas 6 siswa TK dan 23 siswa SD. Kehadiran mereka menunjukkan adanya kebutuhan sekaligus potensi partisipasi yang dapat dikembangkan melalui kegiatan pendidikan berbasis komunitas. Anak tidak ditempatkan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran melalui kegiatan membawa dan menyelesaikan tugas sekolah, menyampaikan materi yang belum dipahami, mengajukan pertanyaan, serta mengikuti latihan yang diberikan mahasiswa. Pola keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa peserta didik memiliki kapasitas untuk

menjadi bagian dari proses pengembangan kegiatan, bukan sekadar objek yang menerima layanan pendidikan.

Selain aset manusia, hubungan sosial masyarakat menjadi aset yang memungkinkan kegiatan diterima dan berlangsung dalam suasana yang relatif terbuka. Kehidupan masyarakat Dukuh Temon yang ditandai oleh interaksi antarwarga memberikan ruang bagi mahasiswa untuk membangun komunikasi dengan keluarga dan masyarakat sekitar. Hubungan sosial tersebut menjadi penting karena program pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat membutuhkan kepercayaan, penerimaan, dan keterlibatan warga. Tanpa adanya hubungan sosial yang mendukung, keberadaan mahasiswa sebagai pihak luar dapat berjarak dengan masyarakat dan kegiatan berpotensi hanya menjadi aktivitas sementara. Dalam konteks ini, jejaring sosial masyarakat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan mahasiswa, anak, orang tua, dan lingkungan sekitar dalam satu kegiatan pendidikan.

Aset kelembagaan juga menjadi bagian yang mendukung pelaksanaan program. Pemerintah Desa Pagerukir memiliki posisi penting dalam memberikan legitimasi sosial dan dukungan terhadap kegiatan mahasiswa di wilayahnya. Selain pemerintah desa, keberadaan sekolah dan guru menjadi aset kelembagaan yang dapat memberikan informasi mengenai kebutuhan belajar anak serta kondisi pembelajaran yang mereka alami di sekolah. Hubungan antara masyarakat, pemerintah desa, sekolah, dan mahasiswa menunjukkan bahwa kegiatan bimbingan belajar memiliki peluang untuk berkembang menjadi kegiatan yang lebih terhubung dengan lingkungan pendidikan anak. Artinya, program tidak berdiri sebagai aktivitas mahasiswa yang terpisah dari sistem pendidikan yang telah ada, tetapi dapat ditempatkan sebagai pelengkap yang memperkuat hubungan antara pendidikan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Aset fisik menjadi pendukung lain yang memungkinkan kegiatan berlangsung secara praktis. Ketersediaan tempat yang dapat digunakan sebagai ruang berkegiatan, termasuk fasilitas posko mahasiswa, memberikan ruang belajar yang relatif mudah dijangkau oleh anak-anak. Dalam pendekatan ABCD, fasilitas tersebut tidak harus dipahami sebagai sarana pendidikan yang ideal dalam pengertian formal, tetapi sebagai sumber daya lokal yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia juga menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak membutuhkan investasi fisik yang besar untuk dapat memberikan manfaat. Yang lebih penting adalah kemampuan menghubungkan fasilitas tersebut dengan sumber daya manusia dan hubungan sosial yang telah ada.

Dengan demikian, pemetaan aset di Dukuh Temon menunjukkan bahwa kekuatan utama program bimbingan belajar bukan terletak pada satu jenis aset tertentu, melainkan pada hubungan antaraset. Mahasiswa menyediakan kapasitas pendampingan, anak menyediakan partisipasi dan kebutuhan belajar, masyarakat menyediakan jejaring sosial, pemerintah desa dan sekolah memberikan dukungan kelembagaan, sedangkan fasilitas yang tersedia menyediakan ruang bagi kegiatan. Hubungan tersebut memperlihatkan prinsip dasar ABCD bahwa aset akan memiliki nilai pemberdayaan yang lebih besar ketika tidak berdiri sendiri, tetapi dihubungkan untuk menghasilkan tindakan bersama. Dalam konteks bimbingan belajar, proses tersebut mengubah kegiatan dari sekadar aktivitas mengajar oleh mahasiswa menjadi ruang kolaborasi pendidikan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Temuan ini sekaligus menjadi dasar untuk melihat keberlanjutan program, sebab semakin banyak aset lokal yang terlibat dalam suatu kegiatan, semakin besar peluang kegiatan tersebut tidak sepenuhnya bergantung pada keberadaan mahasiswa KPM.



Aset Masyarakat yang Mendukung Program Bimbingan Belajar

Pada level aset sosial dan kelembagaan, guru SDN 3 Pagerukir merupakan salah satu sumber daya penting dalam mendukung program bimbingan belajar. Guru memiliki pengetahuan mengenai materi pembelajaran, karakter peserta didik, serta perkembangan belajar anak di sekolah sehingga dapat memberikan informasi yang tidak selalu dimiliki oleh mahasiswa KPM. Pak Suyoko, salah satu guru SDN 3 Pagerukir, menyampaikan bahwa proses mengajar menjadi lebih mudah ketika

anak-anak telah mempelajari materi terlebih dahulu bersama mahasiswa KPM pada malam sebelumnya (wawancara, 19 Agustus 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan mahasiswa dan guru tidak perlu ditempatkan sebagai dua sumber belajar yang berjalan sendiri-sendiri. Ketika keduanya dihubungkan, pendampingan di masyarakat dapat menjadi bagian yang melengkapi proses pembelajaran di sekolah.

Orang tua juga merupakan aset sosial yang memiliki posisi penting dalam ekosistem pendidikan anak. Meskipun kemampuan dan waktu orang tua untuk mendampingi pembelajaran tidak sama, keluarga tetap menjadi lingkungan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari anak. Peran orang tua tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk kemampuan menjelaskan seluruh materi pelajaran, tetapi dapat berupa pemberian dukungan, pengawasan, motivasi, serta pembentukan kebiasaan belajar di rumah. Bapak Sarnun, salah satu orang tua peserta didik, menyampaikan bahwa dirinya merasa “sangat senang adanya bimbel karena bisa memperingan dirinya, dan anak lebih bisa memahami pelajaran” (wawancara, 13 Agustus 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kehadiran bimbingan belajar dipandang sebagai dukungan terhadap fungsi keluarga, bukan sebagai pengganti peran orang tua dalam mendidik anak.

Pada tingkat kelembagaan, pemerintah desa menjadi aset yang memberikan dukungan sekaligus legitimasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Kepala Desa Pagerukir, Pak Suminto, menyatakan bahwa dirinya “sangat senang adanya anak KPM karena sangat membantu kegiatan desa dan membantu anak-anak untuk belajar” (wawancara, 13 Agustus 2026). Dukungan tersebut penting karena kegiatan pendidikan berbasis masyarakat membutuhkan penerimaan dari lingkungan tempat program dilaksanakan. Pemerintah desa memiliki posisi strategis dalam menghubungkan mahasiswa dengan masyarakat serta membuka peluang agar kegiatan yang telah dirintis selama KPM dapat memperoleh dukungan lokal setelah mahasiswa menyelesaikan masa pengabdian.

Sementara itu, posko KPM menjadi aset fisik yang secara langsung mendukung pelaksanaan bimbingan belajar. Pemanfaatan posko sebagai ruang belajar menunjukkan bahwa program tidak harus diawali dengan pembangunan fasilitas pendidikan baru. Fasilitas yang telah tersedia dapat dialihfungsikan sesuai kebutuhan masyarakat selama memiliki akses yang memadai dan dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman. Dalam perspektif ABCD, pemanfaatan fasilitas lokal semacam ini merupakan bagian dari upaya mengidentifikasi dan

mengoptimalkan aset yang sudah dimiliki komunitas sebelum mencari sumber daya tambahan dari luar.

Jika setiap aset tersebut dilihat secara terpisah, masing-masing memiliki keterbatasan. Mahasiswa KPM memiliki pengetahuan dan waktu untuk mendampingi anak, tetapi keberadaannya bersifat sementara dan jejaring sosialnya di masyarakat masih terbatas. Guru memiliki pengetahuan mengenai pembelajaran dan karakter siswa, tetapi waktu untuk memberikan pendampingan individual di luar jam sekolah terbatas. Orang tua memiliki kedekatan emosional dengan anak, tetapi kapasitas dan waktu pendampingannya berbeda-beda. Pemerintah desa memiliki jaringan dan kewenangan sosial yang lebih luas, tetapi bukan lembaga yang secara khusus menyelenggarakan bimbingan belajar. Posko menyediakan ruang kegiatan, tetapi keberadaannya baru menjadi bermakna ketika dihubungkan dengan sumber daya manusia dan kebutuhan masyarakat.

Kekuatan program justru muncul ketika berbagai aset tersebut dipertemukan dalam satu kegiatan. Mahasiswa menyediakan pendampingan belajar, anak berperan sebagai peserta sekaligus pelaku kegiatan, guru memberikan pengetahuan mengenai kebutuhan pembelajaran, orang tua memberikan dukungan dari lingkungan keluarga, pemerintah desa memberikan legitimasi dan dukungan kelembagaan, sedangkan posko menyediakan ruang untuk melaksanakan kegiatan. Pola hubungan tersebut sejalan dengan prinsip ABCD yang dikemukakan Kretzmann dan McKnight (1993), bahwa pembangunan komunitas bertumpu pada kemampuan menghubungkan berbagai aset yang telah dimiliki masyarakat sehingga dapat menghasilkan tindakan bersama.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendampingan belajar anak di Dukuh Temon bukan terutama terletak pada ketiadaan sumber daya, melainkan pada belum terhubungnya sumber daya yang tersedia secara sistematis. Aset manusia, sosial, kelembagaan, dan fisik sebenarnya telah hadir dalam kehidupan masyarakat, tetapi masing-masing sebelumnya berjalan dalam ruang yang relatif terpisah. Kehadiran program KPM kemudian menjadi momentum untuk mempertemukan aset-aset tersebut dalam satu kegiatan pendidikan. Dengan demikian, keberhasilan awal program lebih banyak ditentukan oleh kemampuan mengorganisasikan dan menghubungkan aset lokal daripada sekadar menghadirkan sumber daya baru dari luar. Temuan ini sekaligus menjadi dasar penting bagi pembahasan mengenai pelaksanaan program dan peluang keberlanjutannya setelah mahasiswa KPM tidak lagi berada di Dukuh Temon.

Pelaksanaan Bimbingan Belajar sebagai Upaya Menjaga Kontinuitas Sumber Belajar

Bimbingan belajar di Dukuh Temon dilaksanakan dengan menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan peserta yang berasal dari jenjang pendidikan berbeda. Penyesuaian tersebut penting karena kebutuhan belajar anak usia TK tentu berbeda dengan siswa SD maupun SMP. Pada kelompok TK, kegiatan diarahkan pada aktivitas belajar dasar dengan suasana yang lebih sederhana, komunikatif, dan tidak terlalu formal. Pendampingan dilakukan dengan bantuan langsung dan aktivitas yang sesuai dengan kemampuan anak usia dini. Sementara itu, pada kelompok SD yang berjumlah 23 anak, kegiatan lebih banyak diarahkan pada penyelesaian pekerjaan rumah, pengulangan materi yang telah dipelajari di sekolah, serta persiapan materi yang akan dipelajari pada hari berikutnya. Tiga siswa SMP juga memperoleh pendampingan berdasarkan materi yang sedang mereka pelajari sehingga kegiatan tidak menggunakan satu pola pembelajaran yang sama untuk seluruh peserta.

Salah satu karakteristik program yang menonjol adalah upaya menghubungkan materi bimbingan belajar dengan pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Sebagian materi yang diberikan berkaitan dengan pelajaran yang akan dibahas pada hari berikutnya sehingga anak memiliki pengetahuan awal sebelum mengikuti pembelajaran formal. Pola tersebut memperoleh respons positif dari guru. Pak Suyoko menjelaskan bahwa proses mengajar menjadi lebih mudah ketika siswa telah mempelajari materi terlebih dahulu bersama mahasiswa KPM pada malam sebelumnya (wawancara, 19 Agustus 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa bimbingan belajar tidak ditempatkan sebagai pengganti pembelajaran sekolah, tetapi sebagai ruang persiapan yang membantu anak memasuki pembelajaran formal dengan bekal pengetahuan awal.

Dalam konteks tersebut, bimbingan belajar berfungsi sebagai jembatan antara lingkungan belajar di rumah, masyarakat, dan sekolah. Slameto (2015) menjelaskan bahwa kesiapan belajar merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap proses belajar peserta didik. Bimbingan yang diberikan sebelum materi dibahas di kelas dapat membantu anak mengenali konsep dasar, memahami istilah yang belum dikenal, dan mengidentifikasi bagian materi yang masih sulit dipahami. Dengan demikian, hubungan antara bimbingan belajar dan sekolah bersifat komplementer. Mahasiswa tidak mengambil alih otoritas guru dalam proses pembelajaran, tetapi memberikan ruang tambahan bagi anak untuk mempersiapkan diri dan memperoleh pendampingan yang lebih intensif.

Selain persiapan materi, penyelesaian pekerjaan rumah menjadi salah satu aktivitas yang cukup dominan. Kebutuhan tersebut terlihat dari keterangan warga dan peserta didik. Pak Sinto menyampaikan bahwa bimbingan belajar membantu “anak-anak untuk belajar/mengerjakan PR” (wawancara, 11 Agustus 2026). Hal serupa disampaikan Wasis, siswa kelas VI SD, yang mengaku “sangat senang karena ada yang membantu mengerjakan PR dan membantu memperjelas pelajaran yang belum paham” (wawancara, 19 Agustus 2026). Kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa program hadir untuk menjawab kebutuhan belajar yang konkret dan dirasakan langsung oleh peserta. Bimbingan tidak dibangun berdasarkan materi yang sepenuhnya ditentukan oleh mahasiswa, tetapi berkembang dari persoalan yang dihadapi anak dalam aktivitas belajar sehari-hari.

Meskipun demikian, pendampingan diarahkan agar tidak berubah menjadi aktivitas pemberian jawaban secara langsung. Mahasiswa berusaha memberikan penjelasan, contoh, dan pertanyaan pengarah sebelum memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan tugas secara mandiri. Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan Sanjaya (2016) mengenai pentingnya keterlibatan aktif peserta didik dalam membangun pengetahuan. Anak didorong untuk memahami cara memperoleh jawaban, bukan hanya memperoleh jawaban akhir. Dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut menghadapi tantangan karena peserta memiliki kemampuan, usia, karakter, dan tingkat kemandirian belajar yang berbeda. Namun, upaya memberikan ruang kepada anak untuk mencoba secara mandiri menunjukkan bahwa kegiatan diarahkan tidak hanya untuk menyelesaikan tugas sekolah, tetapi juga membangun kebiasaan belajar.

Suasana pembelajaran yang lebih santai juga menjadi salah satu karakteristik kegiatan. Anak memiliki ruang yang lebih leluasa untuk bertanya, mengulang penjelasan, atau menyampaikan bagian materi yang belum dipahami tanpa tekanan suasana kelas formal. Uno (2016) menjelaskan bahwa motivasi memiliki peranan penting dalam proses belajar dan kondisi lingkungan yang mendukung dapat membantu menciptakan keterlibatan peserta didik. Dalam kegiatan di Dukuh Temon, suasana yang relatif informal membuat interaksi antara mahasiswa dan anak berlangsung lebih dekat. Kedekatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengenali kesulitan belajar anak secara lebih individual, sementara anak memperoleh ruang untuk meminta bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dari 29 anak yang terdaftar sebagai peserta, rata-rata sekitar 23 anak hadir dalam setiap pertemuan. Tingkat kehadiran tersebut memang mengalami variasi

karena peserta memiliki aktivitas sekolah dan kondisi keluarga yang berbeda, tetapi jumlah kehadiran yang relatif stabil menunjukkan bahwa kegiatan memperoleh respons positif dari peserta. Dalam perspektif ABCD, kehadiran dan partisipasi anak dapat dipahami sebagai aset yang penting. Anak yang bersedia hadir secara rutin bukan hanya penerima manfaat program, tetapi merupakan modal sosial yang dapat menjadi dasar bagi terbentuknya kebiasaan belajar bersama. Apabila partisipasi tersebut dapat dipertahankan dan secara bertahap melibatkan anak dalam pengelolaan kegiatan, kelompok belajar yang terbentuk selama KPM memiliki peluang untuk berkembang menjadi sumber belajar berbasis komunitas.

Program juga memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa KPM. Interaksi dengan peserta dari jenjang yang berbeda mengharuskan mahasiswa menyesuaikan cara menjelaskan materi, mengelola kelompok belajar, dan membangun komunikasi dengan orang tua serta guru. Dengan demikian, proses pemberdayaan berlangsung secara dua arah. Masyarakat dan anak memperoleh dukungan belajar, sementara mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam memahami kebutuhan pendidikan masyarakat dan mengelola pembelajaran dalam konteks yang berbeda dari ruang kelas perguruan tinggi. Mardikanto dan Soebiato (2017) menempatkan proses pemberdayaan sebagai hubungan yang memungkinkan masyarakat berkembang melalui keterlibatan aktif, bukan sekadar menerima bantuan dari pihak luar.

Berdasarkan keseluruhan pelaksanaan tersebut, bimbingan belajar di Dukuh Temon menunjukkan adanya upaya membangun kontinuitas sumber belajar antara rumah, masyarakat, dan sekolah. Kegiatan disesuaikan dengan jenjang peserta, berangkat dari kebutuhan nyata seperti pekerjaan rumah dan persiapan materi, serta memberikan ruang bagi anak untuk memperoleh pendampingan secara lebih fleksibel. Program tidak diarahkan untuk menggantikan peran guru maupun orang tua, tetapi memperkuat keduanya melalui tambahan ruang belajar di lingkungan masyarakat. Dalam kerangka ABCD, pola tersebut menjadi penting karena sumber belajar tidak lagi dipahami hanya sebagai guru atau mahasiswa, tetapi sebagai jaringan aset yang saling mendukung dan dapat terus dimanfaatkan oleh masyarakat.

Manfaat Bimbingan Belajar bagi Peserta Didik dan Masyarakat

Manfaat program bimbingan belajar paling langsung terlihat dari pengalaman peserta didik yang mengikuti kegiatan. Wasis, siswa kelas VI SD, menyampaikan bahwa dirinya senang mengikuti bimbingan belajar karena memperoleh bantuan dalam mengerjakan pekerjaan rumah sekaligus mendapatkan penjelasan mengenai

materi yang belum dipahami (wawancara, 19 Agustus 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan belajar anak tidak selalu berupa tambahan materi pembelajaran, tetapi juga kesempatan untuk memperoleh penjelasan ulang secara lebih sederhana dan personal. Dalam kondisi pembelajaran di kelas yang melibatkan banyak siswa, kesempatan untuk memperoleh pendampingan individual tentu lebih terbatas. Bimbingan belajar kemudian menyediakan ruang tambahan bagi anak untuk menyampaikan kesulitan dan memperoleh bantuan sesuai dengan persoalan yang sedang dihadapinya.

Manfaat lainnya terlihat dari kesempatan anak untuk mengulang materi yang telah dipelajari di sekolah. Pengulangan memberikan ruang kepada peserta didik untuk memperkuat pemahaman terhadap konsep yang belum sepenuhnya dikuasai. Djamarah (2011) menjelaskan bahwa keberhasilan belajar berkaitan dengan latihan dan pengulangan yang dilakukan secara konsisten. Dalam kegiatan di Dukuh Temon, pengulangan tidak dilakukan melalui pemberian materi baru secara terus-menerus, tetapi melalui penjelasan kembali, latihan soal, penyelesaian pekerjaan rumah, dan pembahasan bagian pelajaran yang masih dianggap sulit oleh peserta. Dengan pola tersebut, bimbingan belajar berfungsi sebagai ruang penguatan pembelajaran yang telah diperoleh anak di sekolah.

Bagi keluarga, keberadaan program memberikan dukungan tambahan dalam proses pendampingan belajar anak. Bapak Sarnun menyampaikan bahwa bimbingan belajar “memperingan dirinya” sekaligus membantu anak lebih memahami pelajaran (wawancara, 13 Agustus 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa program memberikan manfaat praktis bagi orang tua yang memiliki keterbatasan waktu untuk mendampingi anak secara intensif. Namun, manfaat tersebut tidak berarti bahwa tanggung jawab pendidikan dialihkan kepada mahasiswa KPM. Sebaliknya, keberadaan pendamping tambahan dapat membantu orang tua memahami kebutuhan belajar anak dan mengetahui materi yang sedang dipelajari. Dengan demikian, bimbingan belajar dapat berfungsi sebagai pelengkap bagi peran keluarga, bukan sebagai pengganti lingkungan pendidikan di rumah.

Harapan masyarakat terhadap perubahan kebiasaan belajar anak juga menjadi bagian penting dari manfaat yang diharapkan dalam jangka lebih panjang. Pak Sinto menyampaikan harapan agar anak-anak dapat terbiasa belajar setiap malam secara mandiri (wawancara, 11 Agustus 2026). Harapan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya melihat manfaat program dari kemampuan anak menyelesaikan pekerjaan rumah, tetapi juga dari kemungkinan terbentuknya kebiasaan belajar yang lebih teratur. Slameto (2015) menjelaskan bahwa kebiasaan

belajar yang baik dan dilakukan secara konsisten memiliki hubungan dengan proses pencapaian belajar peserta didik. Dalam konteks kegiatan ini, bimbingan belajar dapat dipandang sebagai tahap awal untuk membangun rutinitas belajar, meskipun pembentukan kebiasaan tersebut membutuhkan pendampingan yang lebih panjang dan tidak dapat sepenuhnya dinilai selama periode KPM.

Guru juga merasakan manfaat dari adanya kegiatan tersebut. Pak Suyoko menyampaikan bahwa dirinya lebih mudah melaksanakan pembelajaran pada hari berikutnya ketika siswa telah memperoleh pengenalan terhadap materi bersama mahasiswa KPM pada malam sebelumnya (wawancara, 19 Agustus 2026). Temuan ini memperlihatkan adanya hubungan positif antara kegiatan bimbingan belajar dan kesiapan siswa mengikuti pembelajaran di sekolah. Bimbingan belajar dengan demikian tidak hanya memberikan manfaat kepada peserta secara individual, tetapi juga dapat mendukung proses pembelajaran formal melalui pemberian kesempatan kepada siswa untuk mengenali materi sebelum dibahas lebih lanjut oleh guru.

Namun, temuan mengenai manfaat tersebut perlu ditempatkan sesuai dengan karakter data yang diperoleh. Kegiatan ini menggunakan observasi dan wawancara sebagai sumber data sehingga tidak melakukan pengukuran kuantitatif terhadap perubahan nilai akademik sebelum dan sesudah program. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya peningkatan hasil belajar secara statistik atau terukur. Manfaat yang dapat disimpulkan berdasarkan data adalah adanya pengalaman positif dan persepsi manfaat yang disampaikan secara konsisten oleh peserta didik, orang tua, guru, warga, dan pemerintah desa. Kehati-hatian dalam menarik kesimpulan tersebut penting agar manfaat program tidak dilebihkan melampaui bukti empiris yang tersedia.

Pada tingkat masyarakat, pemerintah desa juga melihat keberadaan program sebagai bentuk kontribusi yang memberikan manfaat langsung. Pak Suminto menyampaikan bahwa kehadiran mahasiswa KPM sangat membantu kegiatan desa sekaligus membantu anak-anak dalam belajar (wawancara, 13 Agustus 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pendidikan dapat menjadi salah satu bentuk keterlibatan mahasiswa dalam kehidupan masyarakat yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung. Dalam konteks pendidikan berbasis masyarakat, keterlibatan berbagai unsur lokal menjadi penting karena pendidikan tidak hanya berlangsung melalui lembaga formal, tetapi juga melalui interaksi dan partisipasi masyarakat. Zubaedi (2013) menjelaskan bahwa pendidikan berbasis masyarakat memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya.

Jika dilihat secara keseluruhan, manfaat bimbingan belajar di Dukuh Temon berlangsung pada beberapa tingkatan. Pada tingkat peserta didik, kegiatan memberikan tambahan ruang untuk memahami materi, mengulang pelajaran, dan menyelesaikan pekerjaan rumah. Pada tingkat keluarga, program memberikan dukungan terhadap pendampingan belajar anak. Pada tingkat sekolah, kegiatan membantu mempersiapkan siswa sebelum mengikuti pembelajaran berikutnya. Sementara itu, pada tingkat masyarakat, program memperkuat perhatian dan keterlibatan berbagai pihak terhadap pendidikan anak. Dengan demikian, bimbingan belajar tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan tambahan di luar sekolah, tetapi juga menjadi ruang pertemuan berbagai aset pendidikan yang terdapat di lingkungan masyarakat.

Keberlanjutan Program sebagai Tantangan Pengorganisasian Aset Lokal

Keberlanjutan menjadi salah satu persoalan penting dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat karena keberadaan mahasiswa pada dasarnya bersifat sementara. Kondisi tersebut juga ditemukan dalam program bimbingan belajar di Dukuh Temon. Bapak Sarnun berharap pada masa mendatang terdapat generasi penerus yang dapat melanjutkan kegiatan setelah mahasiswa KPM tidak lagi berada di dukuh tersebut (wawancara, 13 Agustus 2026). Pak Suminto juga berharap terdapat penerus dari masyarakat lokal, meskipun pada saat yang sama berharap kegiatan KPM dapat kembali dilaksanakan di Pagerukir (wawancara, 13 Agustus 2026). Sementara itu, Pak Suyoko menyampaikan harapan agar setelah mahasiswa KPM kembali ke kampus tetap terdapat pihak yang melanjutkan kegiatan karena terdapat kekhawatiran anak-anak akan berkurang motivasinya untuk belajar secara mandiri (wawancara, 19 Agustus 2026).

Ketiga pandangan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap keberlanjutan program, sekaligus memperlihatkan bahwa mekanisme untuk mempertahankannya belum terbentuk secara kuat. Dengan kata lain, persoalan utama bukan terletak pada rendahnya penerimaan masyarakat terhadap bimbingan belajar, tetapi pada belum adanya pihak lokal yang secara jelas mengambil peran sebagai pengelola setelah masa KPM berakhir. Kondisi ini menjadi penting dalam perspektif ABCD karena program pemberdayaan seharusnya tidak berhenti pada keberhasilan pelaksanaan kegiatan selama pihak eksternal masih berada di tengah masyarakat. Kretzmann dan McKnight (1993) menekankan pentingnya membangun kapasitas yang tertinggal di dalam komunitas sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk mengembangkan kehidupannya dengan memanfaatkan aset yang tersedia.

Berdasarkan pemetaan aset sebelumnya, terdapat sejumlah sumber daya lokal yang dapat dikembangkan sebagai dasar keberlanjutan. Pemuda desa, misalnya, dapat dilibatkan sebagai pendamping belajar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Mereka tidak harus menguasai seluruh mata pelajaran karena pendampingan dapat dibagi berdasarkan tingkat pendidikan dan kompetensi masing-masing. Pola tersebut memungkinkan kegiatan tetap berjalan meskipun dalam skala yang lebih sederhana dibandingkan ketika didukung oleh sepuluh mahasiswa KPM. Dengan demikian, keberlanjutan tidak harus berarti mempertahankan bentuk kegiatan secara persis sama, tetapi mempertahankan fungsi utama program sebagai ruang pendampingan belajar anak.

Orang tua juga dapat menjadi bagian dari mekanisme keberlanjutan. Harapan Pak Suyoko agar orang tua ikut membimbing anak setiap malam menunjukkan bahwa keluarga memiliki peluang untuk mengambil sebagian fungsi pendampingan setelah mahasiswa meninggalkan lokasi (wawancara, 19 Agustus 2026). Peran tersebut tidak harus berupa pengajaran seluruh materi sekolah. Orang tua dapat berkontribusi melalui kegiatan sederhana seperti menemani anak belajar, menanyakan tugas sekolah, mengingatkan jadwal belajar, atau memastikan anak memiliki waktu belajar yang teratur. Helmawati (2014) menjelaskan bahwa keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan memiliki peran mendasar dalam perkembangan anak. Oleh karena itu, penguatan peran keluarga dapat menjadi salah satu strategi penting untuk mengurangi ketergantungan program terhadap pendamping eksternal.

Guru juga dapat ditempatkan sebagai bagian dari jejaring keberlanjutan, terutama dalam memberikan informasi mengenai materi pembelajaran dan kesulitan yang dihadapi siswa. Peran guru tidak harus berupa keterlibatan langsung dalam setiap sesi bimbingan, tetapi dapat berupa komunikasi dengan pendamping lokal mengenai materi yang sedang dipelajari atau peserta didik yang membutuhkan perhatian lebih. Pemerintah desa juga memiliki posisi strategis sebagai penghubung antarpihak. Dukungan pemerintah desa dapat diwujudkan melalui penyediaan atau pemanfaatan ruang, penyebaran informasi mengenai kegiatan, penghubungan dengan pemuda dan masyarakat, serta fasilitasi komunikasi dengan pihak sekolah. Dengan demikian, keberlanjutan tidak selalu membutuhkan dukungan anggaran dalam jumlah besar, tetapi membutuhkan koordinasi dan pembagian peran yang jelas.

Mahasiswa KPM tetap memiliki posisi penting dalam proses tersebut, tetapi perannya perlu mengalami perubahan. Pada tahap awal, mahasiswa dapat berfungsi

sebagai pemantik dan pelaksana kegiatan. Pada tahap berikutnya, mahasiswa perlu mulai mengalihkan sebagian fungsi kepada aset lokal dengan memberikan ruang bagi pemuda, orang tua, guru, dan masyarakat untuk terlibat. Apabila KPM kembali dilaksanakan pada masa mendatang, mahasiswa dapat berperan sebagai penguat terhadap sistem yang telah dibangun, bukan kembali memulai kegiatan dari awal. Pola ini lebih sesuai dengan prinsip ABCD karena pihak eksternal berfungsi memperkuat kapasitas komunitas, sementara sumber daya utama untuk mempertahankan program tetap berada di dalam masyarakat.

Beberapa langkah sederhana dapat dilakukan untuk mendukung proses tersebut. Kelompok belajar dapat dibentuk berdasarkan jenjang pendidikan agar pendampingan lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Jadwal tidak harus berlangsung setiap malam, tetapi dapat ditetapkan beberapa kali dalam seminggu sesuai ketersediaan pendamping lokal. Materi dan pola kegiatan juga dapat didokumentasikan secara sederhana agar pendamping berikutnya memiliki acuan dan tidak perlu memulai seluruh proses dari awal. Dokumentasi tersebut dapat memuat daftar peserta, jadwal kegiatan, pembagian kelompok, materi yang telah dibahas, serta bentuk pendampingan yang digunakan. Langkah sederhana semacam ini dapat membantu mengubah kegiatan yang semula bersifat temporer menjadi pengetahuan dan mekanisme yang dapat diwariskan kepada pelaksana berikutnya.

Dengan demikian, keberlanjutan bimbingan belajar di Dukuh Temon lebih tepat dipahami sebagai persoalan pengorganisasian aset daripada persoalan kekurangan sumber daya. Pemuda, orang tua, guru, pemerintah desa, peserta didik, fasilitas, dan jejaring sosial telah tersedia, tetapi belum seluruhnya terhubung dalam mekanisme yang memungkinkan kegiatan berjalan secara mandiri. Program KPM telah menunjukkan bahwa berbagai aset tersebut dapat dipertemukan dalam satu kegiatan pendidikan. Tantangan berikutnya adalah mengubah hubungan yang terbentuk selama masa KPM menjadi pola kerja yang dapat dipertahankan oleh masyarakat. Dalam konteks tersebut, mahasiswa KPM berperan sebagai pemantik dan penguat kapasitas, sedangkan keberlanjutan jangka panjang perlu bertumpu pada kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengorganisasikan, dan menggerakkan aset yang mereka miliki sendiri.

KESIMPULAN

Program bimbingan belajar di Dukuh Temon, Desa Pagerukir, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki berbagai aset yang dapat dioptimalkan untuk mendukung keberlanjutan pendidikan anak. Aset tersebut mencakup sumber daya

manusia berupa mahasiswa KPM, peserta didik, guru, dan orang tua; aset sosial berupa hubungan antarwarga dan dukungan keluarga; aset kelembagaan berupa sekolah dan pemerintah desa; serta aset fisik berupa fasilitas posko yang dimanfaatkan sebagai ruang belajar. Pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) membantu mengarahkan program dari pola pemberian bantuan menuju proses pengorganisasian aset yang telah tersedia di masyarakat. Temuan utama menunjukkan bahwa kekuatan program tidak terutama terletak pada hadirnya sumber daya baru, tetapi pada kemampuan menghubungkan berbagai aset yang sebelumnya berjalan secara terpisah untuk mendukung kebutuhan belajar anak.

Pelaksanaan program melibatkan 29 peserta didik yang terdiri atas 6 siswa TK dan 23 siswa SD, dengan pendampingan 10 mahasiswa KPM. Kegiatan dilaksanakan secara fleksibel dengan menyesuaikan jenjang, kemampuan, dan kebutuhan belajar peserta, terutama melalui pendampingan pekerjaan rumah, pengulangan materi, serta persiapan materi pembelajaran yang akan dibahas di sekolah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, program dipersepsikan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Anak memperoleh tambahan ruang untuk bertanya, mengulang materi, dan memahami pelajaran yang belum dikuasai; orang tua memperoleh dukungan dalam mendampingi proses belajar; guru mendapatkan dukungan karena sebagian siswa telah memiliki pengetahuan awal sebelum mengikuti pembelajaran; sedangkan masyarakat dan pemerintah desa melihat kegiatan sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pendidikan anak di lingkungan mereka. Temuan tersebut merupakan persepsi dan pengalaman para pihak berdasarkan data kualitatif, sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan peningkatan hasil belajar secara kuantitatif.

Keberlanjutan menjadi tantangan utama program karena keberadaan mahasiswa KPM bersifat sementara, sementara mekanisme lokal untuk meneruskan kegiatan belum terbentuk secara optimal. Oleh karena itu, keberlanjutan program perlu diarahkan pada penguatan dan pengorganisasian aset yang telah tersedia, terutama melalui keterlibatan pemuda desa, peningkatan konsistensi pendampingan orang tua, komunikasi dengan guru, serta dukungan pemerintah desa sebagai penghubung antarpihak. Mahasiswa KPM pada periode berikutnya dapat ditempatkan sebagai fasilitator dan penguat sistem yang telah dibangun, bukan sebagai satu-satunya pelaksana kegiatan. Dengan demikian, pengalaman di Dukuh Temon menunjukkan bahwa bimbingan belajar yang sederhana dapat berkembang menjadi bentuk pemberdayaan masyarakat apabila dilaksanakan dengan

menghubungkan dan menggerakkan aset lokal secara terencana. Keberlanjutan program pada akhirnya tidak terutama ditentukan oleh seberapa lama mahasiswa berada di masyarakat, tetapi oleh sejauh mana pengetahuan, jejaring, peran, dan mekanisme kegiatan dapat ditinggalkan dan dikelola oleh masyarakat setelah masa pengabdian berakhir.

REFERENCES

- Djamarah, S. B. (2011). *Psikologi belajar*. Rineka Cipta.
- Handayani, R. (2019). Bimbingan belajar berbasis masyarakat sebagai upaya pendampingan pendidikan anak di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 112–121.
- Helmawati. (2014). *Pendidikan keluarga: Teoretis dan praktis*. Remaja Rosdakarya.
- Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). *Building communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets*. ACTA Publications.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muslich, M. (2014). *Pendidikan karakter: Menjawab tantangan krisis multidimensional*. Bumi Aksara.
- Nugroho, A. (2021). Penerapan pendekatan Asset Based Community Development dalam program literasi anak di wilayah pedesaan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan*, 5(1), 45–56.
- Sanjaya, W. (2016). *Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan*. Kencana.
- Slameto. (2015). *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Rineka Cipta.
- Soetomo. (2012). *Keswadayaan masyarakat: Manifestasi kapasitas masyarakat untuk berkembang secara mandiri*. Pustaka Pelajar.
- Suharto, E. (2014). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Refika Aditama.
- Uno, H. B. (2016). *Teori motivasi dan pengukurannya: Analisis di bidang pendidikan*. Bumi Aksara.
- Wulandari, S., & Prasetyo, D. (2020). Efektivitas pendampingan belajar berbasis komunitas oleh mahasiswa KKN di pedesaan Jawa Tengah. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(3), 201–210.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan masyarakat: Wacana dan praktik*. Kencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.